

ANAK - PERLINDUNGAN

2023

PERDAPROV NTT NO. 1, LD 2023/NO.001 TLD NO.0127

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Abstrak : - Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga, karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi serta memperoleh hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan hak anak belum terwujud secara optimal dan masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perlindungan Anak.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011 , UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 21 Tahun 2022, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 dan PERDAPROV No. 3 Tahun 2009
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Anak dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Perlindungan anak berdasarkan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Diatur tentang Ruang lingkup, Hak dan kewajiban, Kewajiban dan tanggung jawab, Kedudukan anak, Kuasa asuh, Perwalian, Pengasuh dan pengangkatan anak, Penyelenggaraan perlindungan, Peran masyarakat, Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Larangan, Pendanaan, Ketentuan penyidikan dan Ketentuan pidana.

Catatan

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2023
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 6 hlm